

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009–2012**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Alich Sri Ajeng Noviasari
135020101111026**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

**THE INFLUENCE OF GENERAL ALLOCATION
FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND, AND REGION
OWN-SOURCE REVENUE ON THE GROSS
DOMESTIC REGIONAL PRODUCT OF THE
REGENCIES/CITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE
YEAR 2009-2012**

MINOR THESIS

By:

**Alich Sri Ajeng Noviasari
135020101111026**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009–2012

Yang disusun oleh :

Nama : Alich Sri Ajeng Noviasari
NIM : 135020101111026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 April 2017.

Malang, 11 April 2017

Dosen Pembimbing,



Eddy Suprpto, SE., ME.

NIP. 19580709 198603 1 002

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009–2012

Alich Sri Ajeng Noviasari, Eddy Suprpto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : alichajeng7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2009 sampai 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda pada pata data panel menggunakan Eviews 7 untuk menentukan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Karena menggunakan data panel, langkah pertama adalah dengan dengan melaukan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model yang digunakan serta pengujian asumsi klasik. Hasil dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada satu variabel yang berpengaruh signifikan, dan dua tidak berdampak signifikan. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupetn/Kota, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, PDRB Kabupaten/Kota

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yaitu kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah. Jadi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadikan pemerintah agar lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan baik (Kuncoro, 2004).

Menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena peran dari pemerintah daerah. Namun desentralisasi fiskal yang tidak berpegang pada standart teori desentralisasi maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Pada tahun 2012 dari keenam provinsi di Pulau Jawa, terdapat tiga provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,23%, yaitu Provinsi Jawa Timur 7,27%, DKI Jakarta 6,53% dan Jawa Tengah 6,34%.

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk sebesar 32.380.687 jiwa. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah yang sangat berbeda. Dampak yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan tidak hanya dampak negatif saja melainkan terjadinya dampak positif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain

yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negative ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan antar wilayah yang terjadi di kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson menunjukkan bahwa pada kurun waktu Tahun 2009-2012 kesenjangan antar wilayah menyempit selama 2009-2010, namun kian melebar pada Tahun 2011 - 2012. Pada Tahun 2011 - 2012, Indeks Williamson meningkat menjadi 0,6972 dan 0,7042, yang menunjukkan kesenjangan antarwilayah di Jawa Tengah kian melebar. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, sehingga pemerintah menetapkan otonomi daerah dengan tujuan untuk menjadikan lebih dekat dengan rakyat dan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal untuk kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Menurut Kuncoro (2004) PAD mencerminkan *local taxing power* yang cukup sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan ekstrenalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga kondisi ini adalah hal yang baik karena dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah akan dapat mendorong peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah berjumlah sebesar 4 miliar rupiah lebih, tahun 2010 sebesar 4,4 miliar lebih dan pada tahun 2011 pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah sebesar lebih dari 5 miliar rupiah. Dari besaran pendapatan asli daerah tersebut maka pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 mencapai 8,16%, tahun 2009 tumbuh 10,34%, dan tahun 2011 pendapatan asli daerah tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 15,18 %. Sehingga peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun desentralisasi fiskal akan memunculkan persoalan baru, yaitu dengan kemampuan yang tidak sama di setiap daerah dalam mendanai kegiatan operasional sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (Haryanto dan Adi, 2007). Sumber pembiayaan utama pemerintah dan pembangunan daerah berasal dari PAD, namun realisasinya PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat menransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi Wilayah

Wilayah menurut Adisasmita (2013) dapat diartikan suatu permukaan dengan batas-batasnya yang tertentu dimana terjadi interaksi yang intensif antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya pembangunan lainnya dalam berbagai kegiatan produktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah klasifikasi wilayah yang dibuat oleh banyak pakar pengembangan wilayah menurut Adisasmita (2013): Klasifikasi wilayah menurut Okun dan Richardson membagi wilayah menjadi empat kategori diantaranya wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun tinggi, wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun rendah, wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita rendah dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun rendah, dan wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita rendah dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun tinggi; Klasifikasi wilayah menurut John Friedmen dan William Alonso terdiri dari empat macam, yaitu wilayah metropolitan, wilayah poros pembangunan, wilayah perbatasan, dan wilayah tertekan.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul "*The Stages of Economic Growth*", dalam Budiman (2000) merupakan pembangunan ekonomi atau proses tranformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern

merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri. Teori Rostow memberikan kejelasan tahapan-tahapan pencapaian kemajuan yang meliputi; masyarakat tradisional; masyarakat pra kondisi tinggal landas/masyarakat transisional; masyarakat tinggal landas; masyarakat kematangan pertumbuhan/dewasa; masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi. Tahapan tersebut memberikan tawaran secara terperinci pada pengambilan kebijakan di sebuah negara tentang tahapan dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah negara menjadi lebih maju.

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Arsyad, 1999). Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Pendapat yang mendasari teori pembangunan ekonomi regional adalah model neo klasik, teori basis ekonomi, dan teori lokasi,

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Ahli ekonomi yang mengembangkan teori ini adalah Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi menurut analisa Neo Klasik tergantung pada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi karena perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya. Teori pertumbuhan Harrod-Domar adalah teori perkembangan dari teori pertumbuhan John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya mencadangkan atau menabung sebagian pendapatan nasional untuk menambah atau mengganti barang-barang yang rusak. Sehingga dibutuhkan investasi baru untuk tambahan *netto* terhadap cadangan atau stok modal. Analisis Keynes menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Menurut pandangan Smith (dalam Suryana, 2000), pengembangan hak milik, spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith membagi sejarah peradaban manusia kedalam empat tahap yaitu: tahap berburu (*hunting*), tahap beternak (*pastoral*), tahap pertanian (*agricultural*), dan tahap perdagangan (*commerce*). Aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut Smith adalah pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Konsep Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi menggunakan indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997).

Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Daerah

Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah menurut Sjafrizal (2012) adalah: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Daerah

Dana bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat (1988) dalam Kasryno (2007) serta Nurmanah (1989) dalam Pasandaran (1991) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi.

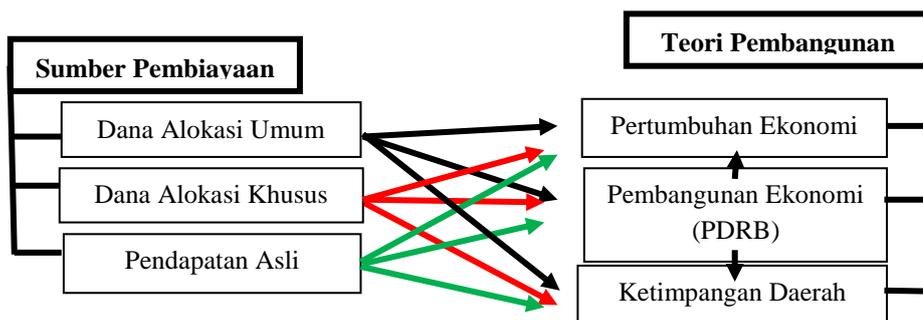
Dengan demikian tidak mengherankan jika keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Alokasi dana bantuan pemerintah yang digunakan disini adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN serta dengan memperhatikan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kabupaten/kota masing-masing.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Ilustrasi penulis , 2017.

Hipotesis

Diduga dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempengaruhi PDRB per kapita ADHK 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel yang terbatas (Dajan, 1996).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi, (i) BPS; Data PDRB per kapita ADHK 2000 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Data Pendapatan Asli Daerah dan (ii) Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus).

Metode Analisis Data

Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi tentang bagaimana pengaruh alokasi dana bantuan pemerintah dengan menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta pendapatan asli daerah, maka harus dibentuk sebuah model regresi berganda dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Persamaan model dengan menggunakan data panel dapat ditulis sebagai berikut,

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}, i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N = banyak observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Y = PDRB per kapita ADHK 2000 Kabupaten / Kota selama periode 2009 – 2012

X₁ = Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode tahun 2009 - 2012

X₂ = Dana Alokasi Khusus (DAK) selama periode tahun 2009 – 2012

X₃ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2009 - 2012

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien masing – masing X₁, X₂, X₃

μ_{it} = Error

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mencapai asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) yaitu model persamaan yang bebas dari pelanggaran asumsi klasik melalui uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Statistika

Uji satistika untuk menentukan seberapa tepat frekuensi yang teramati cocok dengan frekuensi yang diharapkan melau uji t (*t-test*), uji F (*F-test*) dan uji koefisien determinasi (R^2).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode regresi. Jenis data yang diolah adalah data time series 2009 sampai 2012 dan data cross section meliputi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum

melakukan regresi, langkah pertama yang harus dilakukan pada data panel adalah penentuan model yang akan digunakan. Ada tiga model yang digunakan dalam regresi data panel, yaitu pendekatan *pooled least square*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui model yang digunakan *pooled least square* atau *fixed effect model*.

Hasil Regresi Uji *Chow* dengan *Redudant Test*

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	7.552920	(34, 102)	0.0000
Cross-section Chi-square	176.090638	34	0.0000

Sumber: Hasil output regresi Eviews 7, 2017.

Hasil regresi uji *chow* dengan *redundant test* dapat diketahui nilai probabilitas cross-section F nilainya $0.0000 < 0.05$ dan nilai probabilitas *chi-square* $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Selanjutnya membandingkan *fixed effect model* dengan *random effect model* dengan melakukan uji hausman

Hasil Regresi Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	1.735693	3	0.6292

Sumber: Hasil output regresi Eviews 7, 2017.

Dari tampilan tabel diatas dapat diketahui nilai *chi-square* statistik adalah 1.735 dengan df 3 memiliki probabilitas 0.6292. Nilai statistik kemudian dibandingkan dengan nilai kritis *chi-square* dan diketahui dari tabel *chi-square* sebesar 7.185 pada df 3. Jika nilai statistik < nilai kritis maka H_0 diterima, dan jika nilai statistik > nilai kritis maka H_0 ditolak. Berdasarkan tabel diatas nilai statistik adalah $1.735 < 7.185$ sehingga H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *random effect model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Karena menurut Gujarati (2012), data panel sedikit terjadi kolinearitas antar variabel sehingga multikolinearitas yang terjadi sangat kecil.

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Durbin-Waston (DW)*. Dari model terbaik dalam regresi yang terbentuk yaitu model *random effect*, dapat dilihat bahwa nilai DW dari persamaan regresi yang terbentuk adalah sebesar 1.6791.. Sedangkan nilai tabel *Durbin-Watson* dengan $n=35$ dan $k=3$, maka diperoleh nilai $dL= 1.2833$ dan $dU=1.6528$ sehingga nilai $4-dU = 4-1.6528 = 2.3472$, maka nilai DW dari model regresi yang terbentuk pada penelitian ini berada pada area bebas autokorelasi.

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Namun karena model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*, maka heteroskedastisitas yang terjadi sudah diakomodir sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Statistik

Persamaan Regresi Data Panel. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah DAU (X1), DAK (X2), dan PAD(X3). Sedangkan variabel dependennya adalah PDRB (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan statistik tabel di atas maka didapat persamaan regresi berganda dengan menggunakan *random effect model* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} + \epsilon_{it}$$

$$Y_{it} = 902.2778 - 170.4398 X_{1it} + 8.813126 X_{2it} + 42.13295 X_{3it} + \mu_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana: X1 = DAU, X2 = DAK, X3 = PAD, dan Y = PDRB

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

- Konstanta a sebesar 902.2778 menyatakan bahwa jika nilai dari DAU, DAK, dan PAD adalah konstan (0) maka nilai variabel PDRB adalah sebesar 902.2778.
- Nilai koefisien regresi X_1 memiliki hubungan negative -170.4398 untuk variabel DAU, artinya setiap kenaikan 1% bantuan DAU, maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 170.4398 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi X_2 memiliki hubungan positif 8.813126 untuk variabel DAK, artinya setiap kenaikan 1% DAK, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 8.813126 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi X_3 memiliki hubungan positif 42.13295 untuk variabel PAD, artinya setiap kenaikan 1% PAD, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 42.13295 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

Hasil Regresi X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/16/17 Time: 10:19

Sample: 2009 2012

Periods included: 4

Cross-sections included: 35

Total Panel (balanced) observation: 140

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	902.2778	277.6927	3.249139	0.0015
X_1	-170.4398	64.74924	-2.632305	0.0095
X_2	8.813126	119.1277	0.073981	0.9411
X_3	42.13295	30.80186	1.367870	0.1736

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		102.1857	0.6393
Idiosyncratic random		76.76224	0.3607

Weighted Statistics			
R-squared	0.693282	Mean dependent var	8.610270
Adjusted R-squared	0.587998	S.D. dependent var	78.33966
S.E. of regression	76.40432	Sum squared resid	793916.4
F-statistic	3.376994	Durbin-Watson stat	1.679130
Prob(F-statistic)	0.020280		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.119979	Mean dependent var	24.48762
Sum squared resid	2142948.	Durbin-Watson stat	0.547986

Sumber: Hasil output regresi Eviews 7, 2017.

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

- Berdasarkan hasil regresi pada tabel dapat diketahui uji regresi parsial menunjukkan bahwa nilai regresi variabel DAU sebesar -170.4398 dengan t sebesar -2.632305 dan signifikansi $0.0095 < 0.05$, sehingga pengaruh DAU terhadap PDRB negative dan signifikan. Jadi apabila perekonomian suatu wilayah masih rendah dan belum berkembang maka bantuan Dana Alokasi Umum yang diperoleh lebih besar daripada daerah yang perekonomiannya sudah

maju. Daerah yang termasuk kategori maju akan mendapatkan bantuan dana lebih kecil. Sehingga daerah dengan jumlah bantuan lebih kecil memiliki PDRB yang besar. Dana Alokasi Umum memiliki hubungan negative karena berdasarkan data pada tabel diketahui jumlah belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung sehingga daerah membutuhkan bantuan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa. Namun kenyataannya belanja langsung dalam bentuk belanja modal, barang dan jasa yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, penataan taman kota, ruang terbuka hijau, irigasi, sekolah dan berbagai kegiatan infrastruktur lainnya, sangat lambat penyerapannya. Kelambatan terjadi karena ketakutan para pengelola anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang dianggap memiliki risiko sehingga penyerapan Dana Alokasi Umum mengalami kelambatan yang menyebabkan pembangunan di daerah tersebut mengalami hambatan.

- b. Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas ini dapat diketahui nilai koefisien variabel DAK sebesar 8.813126 dengan t sebesar 0.073981 dan signifikansi sebesar $0.9411 > 0.05$, sehingga pengaruh DAK terhadap PDRB adalah positif dan tidak signifikan. Jadi melihat data jumlah bantuan DAK dan realisasinya terhadap masing-masing daerah pada tabel dapat diketahui jika penyerapan Dana Alokasi Khusus ini belum maksimal dalam membiayai belanja daerah. Realisasi Dana Alokasi Khusus di setiap daerah sangat kecil dibandingkan jumlah bantuan dananya dan yang terjadi dana bantuan ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah. Penyerapan Dana Alokasi Khusus ini tidak seimbang dengan jumlah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa dari seluruh daerah yang mendapatkan alokasi DAK, hanya 35% yang berhasil menggunakan 30% jatah DAK sebanyak 90% hingga saat ini. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus yang tidak mengajukan permohonan baru maka dana bantuan untuk daerah tersebut dinyatakan hangus, hal ini yang membuat Dana Alokasi Khusus tidak optimal dalam penggunaannya. Disini peran pemerintah daerah sangat penting dan dibutuhkan peran pemerintah yang berkemampuan dalam mengelola anggaran keuangan daerah. Sehingga Dana Alokasi Khusus mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
- c. Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas ini dapat diketahui nilai koefisien variabel PAD sebesar 42.13295 dengan t sebesar 1.367870 dan signifikansi $0.1736 < 0.05$, sehingga pengaruh PAD terhadap PDRB adalah positif dan tidak signifikan. Ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonominya juga meningkat sehingga hubungan PAD dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah mengakibatkan output daerah yang tercermin pada PDRB di Kabupaten/Kota tidak berjalan secara maksimal. Dengan kurang maksimalnya PDRB yang dihasilkan suatu daerah tentu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari tingkat kenaikan PDRB daerah tersebut. Jadi sangat penting untuk pemerintah daerah memaksimalkan sektor pendapatannya agar mendapat output yang maksimal di setiap sektornya.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi parameter regresi secara simultan. Dimana semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji statistik F tabel menunjukkan nilai signifikansi $0.0202 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara serentak variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-square* (data panel) sebesar 0.587998 artinya secara serentak variabel DAU, DAK, dan PAD mempunyai kontribusi menjelaskan PDRB sebesar 58%, sedangkan sisanya 42% (100% - 58%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten/Kota. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin rendah PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum kecil merupakan daerah dengan kondisi perekonomian daerah yang sedang maju pesat.
2. Berdasarkan hasil penelitian untuk Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/Kota. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus maka akan semakin tinggi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi semakin besar pemerintah pusat memberikan dana bantuan yang bersifat khusus, maka pembangunan daerah semakin baik.
3. Berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/Kota. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi PDRB Kabupaten/Kota. Jadi semakin besar PAD yang dimiliki daerah tersebut maka pembangunan daerahnya juga semakin baik.

Saran

1. Untuk meningkatkan PDRB daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga harus bisa mengupayakan untuk menarik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga realisasi Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus bisa dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah Daerah juga harus melihat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi agar masing-masing variabel ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sehingga kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmah dan rezeki yang tiada henti senantiasa menemani penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan dedikasi sebesar-besarnya bagi keluarga besar, Bapak, Ibu, Adek, dan Kakak tersayang serta teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas dukungan baik materiil maupun non materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3. Yogyakarta: STIE YKPN BPF.
- Budiman, Arif. 2000. *Rostow: Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Gujarati, D.N. dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

- Haryanto, David dan Adi.Priyo Hari. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Pembangunan Daerah: Reformasi Perekonomian Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JESP Vol. 10, No, 1, Juni 209, hal 103-124*. Semarang: FE Universitas Diponegoro Semarang.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Buletin Prisma.
- Sukirno, Sadono.1994. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bimas Grafika.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan-Problematikan dan Pendekatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Todaro, Michael P. dan Smith.Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Williamson, J.G.. 1965. *Regional Inequality and the Process of National Development: a Description of the Patterns.* *Economic Development and Cultural Change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lembaran Negara Republik Indonesia.Pasal 6 Undang-undang No 33 tahun 2004. *Tentang Pendapatan Asli Daerah*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=367> diakses pada 19 Februari 2017.
- Lembaran Negara Republik Indonesia.Pasal 157 Undang-undang No. 32 tahun 2004.Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf diakses pada 19 Februari 2017.